

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK BERDASARKAN PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010

Sofiyul Fu'ad^{1*}, Yudhanta Sambharakreshna²

Universitas Trunojoyo Madura^{1,2}

^{*)}sofifuad123@gmail.com

ABSTRACT

Government accounting is part of public sector accounting. In the description and reporting of financial statements, government accounting has been regulated in PP No. 71 of 2010 which explains government accounting standards. The aim of this research is to understand the differences in the financial reports of the Nganjuk district government since PP No. 71 of 2010 came into force. Research can make a real contribution to accounting science related to the development of knowledge and practice in presenting better and more transparent local government financial reports. Meanwhile, the method used in this research uses a qualitative descriptive method. The data required by this research uses the financial reports of the Nganjuk regional government for the 2023 fiscal year. The results of this research provide an answer that the regional financial reports of Nganjuk district have not fully implemented PP No. 71 of 2010. There are several discrepancies as shown in the financial statements.

Keywords : financial reports, government accounting, analysis, government accounting standards.

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian daripada akuntansi sektor publik. Dalam penjabaran dan pelaporan laporan keuangannya, akuntansi pemerintahan telah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan. Adapun tujuan dari penelitian ini ingin memahami perbedaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nganjuk sejak PP No. 71 tahun 2010 diberlakukan. Penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam ilmu akuntansi terkait pengembangan pengetahuan dan praktik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Data yang dibutuhkan oleh penelitian ini memakai laporan keuangan Pemerintah Daerah Nganjuk tahun anggaran 2023. Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban bahwasanya laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010. Ada beberapa ketidaksesuaian seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan

Kata kunci : laporan keuangan, akuntansi pemerintahan, analisis, standar akuntansi pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi keuangan negara Indonesia sampai sekarang masih difokuskan pemerintah untuk menciptakan keunggulan atas keuangan negara khususnya dalam pengelolaan keuangannya (Ranuba *et al.*, 2015). Pentingnya dilakukan perkembangan ini untuk membuat perubahan di sektor keuangan negara agar dapat bergerak lebih baik dan efisien, salah satunya perubahan yang terjadi berada pada sektor akuntansi ke pemerintahan yang mana melalui prosedur akuntansi dapat dihasilkannya informasi mengenai keuangan yang berguna untuk pihak yang berkepentingan dengan tujuan dan keperluannya sendiri-sendiri (Mentu & & Sondakh, 2016). Informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan berguna untuk mengukur potensi dari sumber daya ekonomi agar ke depannya bisa dikontrol untuk dapat memprediksi kecukupan kapasitas dari sumber daya yang ada (Orniati, 2009).

Dalam hal otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan amanat kepada Pemda agar dapat mengelola keuangannya secara mandiri (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Laporan keuangan harus disusun dengan berpedoman terhadap standar akuntansi, salah satunya harus memenuhi karakteristik akuntansinya yang merupakan prasyarat wajib yang diharuskan. Hal penting dalam laporan keuangan yaitu: relevan/sesuai, andal, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipahami (Harlinda, 2016). Menurut Mardiasmo (2003) bentuk tanggung jawab Pemda pada sekarang ini lebih condong bersifat *horizontal*. Dalam melakukan pelaporan laporan keuangan pemerintahan yang sesuai dan dapat dimengerti, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Hambatan yang dihadapi yakni *objectivity*, *consistency*, *comparability*, *timely* dan *economic* dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berisikan berbagai macam data yang berhubungan terkait keuangan ataupun keseluruhan dalam transaksi yang telah terjadi selama satu periode berjalan (Niu *et al.*, 2014). Laporan keuangan dalam pemerintahan daerah berfungsi untuk mencocokkan antara realisasi anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan dan transfer yang telah ditentukan (Niu *et al.*, 2014). Secara umum, laporan keuangan perusahaan dan pemerintahan berbeda. Laporan keuangan perusahaan terdiri atas laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan laba/rugi, neraca serta catatan atas laporan keuangan; sedangkan laporan keuangan pemerintahan terdiri atas laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Peraturan PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang membentuk dasar untuk penyusunan dan penilaian laporan keuangan pemerintahan (Mentu & J & Sondakh, 2016). PP No. 71 Tahun 2010 mengubah sistem penyusunan dan pelaporan keuangan Indonesia, mengadopsi basis *accrual* dan beralih dari *cash* ke *accrual* penuh dalam perlakuan keuangan (Lamonisi *et al.*, 2016). Tujuan daripada diberlakukannya peraturan tersebut agar lebih *accountable* dan agar menjadi cermin untuk diperlukannya secara bertahap dalam peningkatan laporan keuangan. Mutu dari laporan keuangan pemerintah dipicu dari beragam faktor salah satunya yaitu faktor ketaatan terhadap standar akuntansi, kemampuan SDM dan tunjangan sistem akuntansi yang memadai. Tidak lepas juga dari dinamika pengaruh eksternal yang dapat dikontrol dan diatur oleh organisasi (Sukmaningrum, 2012).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan dirancang selanjutnya akan diserahkan kepada Badan pemeriksa keuangan (BPK) selaku badan yang berguna untuk memeriksa atau mengaudit laporan keuangan daerah agar laporan tersebut telah sesuai dengan pendapatan yang didapat dan juga realisasi dana yang telah dilakukan.

(Governmental Accounting Standards Board (GASB), 1999) *statement No. 1: Financial Reporting's Objectives* memaparkan bahwa *accountability* itu suatu hal pokok yang perlu ada dalam pelaporan keuangan pemda. Pengelolaan keuangan pemerintah harus bergerak lurus sebanding dengan pemerintahan dengan tata kelola baik (*good corporate government*), yaitu dikelolanya keuangan yang dilaksanakan dengan *transparent* dan *accountable*. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang dibuat dapat berguna bagi pemangku kepentingan dalam mengakses informasi di dalam laporan keuangan.

Dalam kewajibannya, anggaran diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk dari setoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari pemerintahan pusat, serta pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memperoleh penghasilan lainnya dari beragam aktivitas dan kegiatan yang terlaksana di berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk. Oleh dengan itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk disarankan untuk melaporkan laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab atas penggunaan atas dana alokasi yang selesai direalisasikan oleh pemerintah pusat. Pelaporan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk haruslah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah di PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

Kesesuaian dalam pelaporan dengan diaturnya dalam peraturan tersebut menjadi poin penting terlaksananya alokasi dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat dan juga pendapatan dari daerah sendiri (Lamonisi *et al.*, 2016). Kesesuaian dalam pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga akan menjadi nilai tambah jika poin-poin yang ada dalam PP No. 71 tahun 2010 telah sejalan sama laporan keuangan yang sudah di buat. Penyusunan laporan keuangan menjadi hal yang krusial dalam sebuah pelaporan terutama dalam pemerintahan. Laporan keuangan yang telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 menjadi poin penting dalam penyusunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi dalam pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya penelitian ini untuk melihat secara keseluruhan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dengan disandingkannya terhadap PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, pertanyaan masalah penelitian dalam penelitian yaitu Apakah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 ? Tujuan adanya penelitian ini untuk menjelaskan dan menjabarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, yaitu menganalisis kesamaan atas penyajian laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai kesesuaian penyajian laporan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam ilmu akuntansi terkait pengembangan pengetahuan dan praktik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan transparan.

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi

AICPA (2022) menyatakan Akuntansi merupakan sebuah seni catat mencatat, pemilahan, dan pengikhtisaran melalui beberapa cara tertentu dengan *transaction* dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat *financial*. Akuntansi diperuntukkan untuk manajemen agar dapat memahami keuangan bisnis perusahaan dan membantu dalam mengatur dan mengontrol pengeluaran pada periode selanjutnya secara strategis. Ilmu akuntansi sudah *familiar* digunakan aktivitas penerapan sehari hari, terutama yang

berkaitan dengan kegiatan *Business*. Akuntansi yang sebenarnya dapat menjadikan manajemen perusahaan mengetahui akan keuangan bisnisnya, sehingga dapat mengontrol dalam pengeluaran tahun berikutnya secara strategis agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Akuntansi pun banyak diterapkan di berbagai bidang seperti pemerintahan, perbankan dan industri manufaktur.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Jamaluddin Majid, 2021) Akuntansi Pemerintahan merupakan cabang dari Akuntansi Sektor Publik di mana perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, pada Akuntansi Sektor Publik lebih luas cakupannya, sedangkan Akuntansi Pemerintahan lebih fokus pada entitas pemerintahan. Akuntansi Sektor Publik menekankan pada akuntabilitas dan transparansi, sedangkan akuntansi pemerintahan menekankan pada pengendalian internal dan kepatuhan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan telah diatur melalui pedoman PP No. 71 Tahun 2010 yang memuat prinsip dasar pelaporan keuangan yang mengatur pembuatan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah (BPK, 2010). SAP menjadi landasan yang mempunyai dampak sah terhadap meningkatnya tingkat pelaporan finansial pemerintah di Indonesia (Mentu & & Sondakh, 2016). Implementasi SAP diperlukan untuk menjadikan pelaporan keuangan semakin berkualitas, memastikan transparansi, dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang akurat. Standar akuntansi pemerintah juga berpengaruh besar akan kualitas ataupun mutu laporan keuangan yang dibuat dan disusun oleh entitas pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan *financial* yang ada di daerah menjadi bagian penting yang mencakup seluruh kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, akuntansi, penyajian, pertanggungjawaban, dan keamanan keuangan daerah. Kegiatan yang mengacu kepada akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban telah diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 perihal finansial negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 perihal Pengamatan dalam tanggung jawab dan pengelolaan *financial* suatu Negara (Jamaluddin Majid, 2021).

Keuangan Daerah yang dikelola menjadikannya bagian penting yang tidak akan terpisahkan dari penyaluran kepentingan pemerintahan dan itu merupakan amanat daerah. APBD dijadikan awal dari pengontrol keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, yang terdiri atas pendapatan dari anggaran, belanja, serta biaya. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara teratur, sesuai perundang-undangan, kompeten, berpengaruh, transparan, dan bertanggung jawab (Pangalila *et al.*, 2016).

Laporan keuangan Pemerintah

Laporan pemerintahan daerah menjadi puncak data penting yang disusun oleh prosedur akuntansi dalam keuangan daerah (Rintiani, 2010). Laporan keuangan dalam pemerintah daerah disajikan agar dapat mencukupi kebutuhan pemakai laporan keuangan sehingga daya banding laporan keuangan dengan anggaran antar periode dan unit dapat ditingkatkan (Nganjuk, 2023). Laporan keuangan pemerintah juga dipakai untuk menentukan nilai dana yang dipergunakan untuk merencanakan aktivitas operasional,

mengevaluasi kompetensi dan efisiensi unit pelaporan serta untuk mengetahui ketetapan yang telah diimplementasikan terhadap peraturan yang masih berlaku.

Laporan keuangan yang ada di dalam ke pemerintahan meliputi :

- a) **Laporan Realisasi Anggaran**
Laporan realisasi anggaran menjadi sebuah laporan awal di dalam laporan keuangan yang difokuskan untuk penyusunan neraca dan laporan-laporan selanjutnya. Anggaran merupakan bagian penting di sebuah pemerintahan, dalam laporan realisasi anggaran membandingkan penggunaan dana pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya (Rahayu, 2016). Laporan realisasi memuat berbagai data terkait belanja pendapatan transfer, *surplus/deficit*, pendapatan, pendanaan dan *over/underfunding* pembiayaan anggaran. Tujuan dari laporan realisasi anggaran untuk mempresentasikan informasi spesifik terkait realisasi anggaran.
- b) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**
LPSAL menjadi satu dari sekian elemen laporan keuangan yang memuat informasi terkait perubahan saldo anggaran lebih (SAL) selama periode pelaporan. Laporan ini disusun secara komparatif berdampingan periode sebelumnya. Tujuan LPSAL yaitu menyajikan laporan perihal kenaikan ataupun penurunan SAL tahun pelaporan disandingkan tahun kemarin. Adapun komponen dalam LPSAL meliputi penggunaan saldo anggaran lebih, saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih dan juga sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Affifah Nurviana Assyayuti, 2015).
- c) **Neraca**
Neraca termasuk laporan yang paling penting dalam laporan keuangan pemerintahan yang mempresentasikan posisi keuangan. Neraca secara menyeluruh berisikan informasi terkait kesehatan keuangan dengan berfokus pada tiga klasifikasi utama, yaitu Aset, kewajiban dan ekuitas. Fungsi dari laporan neraca bagi pemangku kepentingan bisa dijadikan sebagai penilaian tentang kondisi dari kontrol dalam keuangan dan kemampuan dalam melunasi kewajiban.
- d) **Laporan Operasional**
Laporan operasional yang terdapat di dalam LKPD menjadikannya salah satu komponen penting yang menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang berguna untuk meningkatkan ekuitas dan yang dikelola dan diatur oleh Pemerintah Daerah selama tahun berjalan (Fahira, 2010). Tujuan dari laporan operasional yaitu menjadi gambaran tentang kinerja operasional pemda dengan menunjukkan komponen yang sudah terlampir. Laporan operasional terdiri atas komponen beban, pendapatan dan *surplus/deficit* operasional.
- e) **Laporan Arus kas**
Laporan arus kas yang tersaji dalam pemerintah daerah digunakan sebagai alat pengukur yang berisi gambaran terkait mutasi *cash* dari awal ke akhir saat periode laporan (Pandowo & Kudhori, 2017). Pemerintah daerah dalam hal ini tidak bertujuan untuk mengejar laba tetapi memberikan pelayanan. Adapun manfaat laporan arus kas dalam pemerintah daerah antara lain mengetahui sebab adanya *surplus/deficit* anggaran, memperkirakan keberlanjutan keuangan dalam fokus untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
- f) **Laporan Perubahan Ekuitas**
LPE dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi komponen penting yang memberikan informasi terkait bertambah atau berkurangnya ekuitas milik pemda

dalam setahun pelaporan. Ekuitas Pemerintah daerah mencerminkan kepemilikan bersih yang berasal dari perhitungan selisih aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk serta menentukan apakah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan. Tujuan adanya menggunakan metode deskriptif ini untuk menjabarkan sebuah argumentasi mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan dari objek yang diselidiki saat ini (Rajab & Jam'an, 2017)

Data yang dipakai peneliti termasuk dalam data kuantitatif dan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu teknik dokumentasi yang memiliki prosedur menghimpun, menyalin, dan menyimpan informasi dari data yang dibutuhkan nantinya. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan. Analisis deskriptif ialah sebuah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam laporan keuangan, memilih data baku, mengolah dan menafsirkan informasi yang didapatkan. Data yang sudah dikelola selanjutnya disajikan sehingga memberikan informasi dan jawaban yang tepat, relevan dan komplit. Setelah itu, peneliti menentukan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mengikuti atau tidak peraturan PP No. 71 Tahun 2010

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Dinas BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023

Tujuan laporan keuangan Pemerintah Daerah Nganjuk yakni untuk menjabarkan akses macam data yang dapat diandalkan dan terpenting mengenai posisi keuangan serta semua kegiatan *transaction* dalam periode pelaporannya. Laporan keuangan daerah juga dipergunakan untuk mencocokkan antara pendapatan, pengeluaran, pendapatan transfer, dan realisasinya keuangan terhadap anggaran yang sudah ditentukan yang berguna sebagai alat penilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas dan untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap pedoman peraturan yang mengatur perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ialah wujud pertanggungjawaban Dinas BPKAD Kabupaten Nganjuk atas kewajiban dalam mengelola finansial dan kegiatan operasional daerah pada tahun tersebut.

Dinas BPKAD Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk. Adapun klasifikasi di dalam Laporan Keuangan kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2023 yang tersaji antara lain:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nganjuk menyajikan informasi perhitungan pelaksanaan aktivitas yang sudah selesai diimplementasikan dalam setahun anggaran yang terbagi menjadi Pendapatan, *Surplus/deficit* LRA, Belanja serta Pembiayaan *Netto*. Pendapatan terbagi berdasarkan pendapatan melalui transfer, pendapatan asli dari daerah, serta juga lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terbagi menjadi berdasarkan belanja pegawai, belanja modal, belanja operasional, belanja transfer dan belanja tak terduga. *Surplus/deficit* berisikan

saldo selisih lebih atau kurang atas realisasi belanja dan pendapatan tahun anggaran 2023. Pembiayaan *Netto* terbagi menjadi berdasarkan pembiayaan yang diterima dan yang dikeluarkan.

- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
LP-SAL dalam laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk menyajikan informasi pelaksanaan APBD yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ataupun Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) yang meliputi penggunaan SAL sebagai penerjemah pembiayaan, sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran, saldo anggaran lebih awal dan sisa anggaran lebih akhir.
- c) Neraca
Neraca yang tersaji dalam LKPD Kabupaten Nganjuk menunjukkan posisi keuangan mengenai aset, liabilitas dan *equity*. Aset terbagi berdasarkan Aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset-aset yang lainnya. Liabilitas atau kewajiban terbagi menjadi liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang. Sedangkan ekuitas, berisikan kepemilikan *netto* entitas berasal dari perhitungan selisih dari aset serta liabilitas.
- d) Laporan Operasional (LO)
LO dalam LKPD Kabupaten Nganjuk menyediakan informasi terkait total operasi entitas pelaporan yang ter-cerminkan dalam kinerja *surplus/(deficit)*-kegiatan operasional, pendapatan - LO, *surplus/(deficit)* sebelum pos luar biasa, beban, *surplus/deficit* - LO dan pos luar biasa. Pendapatan - LO terbagi menjadi pendapatan dari transfer, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Beban diklasifikasikan berdasarkan beban transfer dan juga beban operasional..
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
LAK dalam LKPD Kabupaten Nganjuk memberikan informasi data terkait kas masuk dan kas keluar, *cash* dan setara kas pada Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah serta juga perincian saldo kas mulai dari awal dan akhir hingga periode anggaran. Laporan Arus Kas diklasifikasikan menjadi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE dalam LKPD Kabupaten Nganjuk menyediakan data dari perubahan *equity*, terdiri atas ekuitas Awal, Koreksi Ekuitas, *Surplus/Deficit*-LO, serta ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan kelanjutan antara Laporan Operasional dan Neraca mengenai penurunan dan kenaikan dari ekuitas pemerintah daerah.
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK LKPD Nganjuk tahun 2023 terdiri atas tujuh bab pelaporan. Informasi tentang tujuan dari penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang dibahas dalam bab pertama. Bab kedua membahas strategi keuangan, makroekonomi, dan strategi kinerja APBD untuk perolehan target. Bab ketiga membahas implementasi tujuan target kinerja keuangan, serta masalah dan strategi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Bab keempat membahas prinsip akuntansi. Ini mencakup laporan keuangan daerah, pedoman dan ketentuan akuntansi yang merupakan bagian penting dari perancangan laporan keuangan, prinsip-prinsip pengukuran awal untuk perancangan laporan keuangan, dan penerapan prinsip akuntansi dalam ruang lingkup yang sama dengan standar akuntansi.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2023 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Komponen LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan ayat 14 PSAP No. 1 yang menyatakan bahwa bagian-bagian laporan keuangan terbagi atas laporan anggaran dan laporan keuangan, yang dirinci menjadi neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas serta catatan laporan keuangan. PSAP No. 1 Ayat 29 menyatakan bahwa penyusunan bagian-bagian komponen laporan keuangan harus jelas dan mencakup nama entitas, ruang lingkup laporan keuangan, tanggal pemasukan, mata uang, dan tingkat ketetapan. Ini juga memastikan bahwa penyusunan bagian - bagian laporan keuangan telah memenuhi syarat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penyusunan LRA dalam LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan PSAP No. 2 ayat 13 yang menyatakan bahwa LRA setidaknya terdapat pos pendapatan-LRA, *surplus/deficit*-LRA, transfer, belanja, sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran serta pembiayaan yang diterima dan dikeluarkan. PSAP No. 2 ayat 21 dan 22 menyebutkan pendapatan-LRA diterima ketika sudah terdapat di dalam rekening kas umum dan terbagi sesuai jenis pendapatan telah diterapkan dalam LRA laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk yang dalam pelaporannya pos pendapatan terdiri atas pendapatan dari transfer, pendapatan daerah asli serta pendapatan lain-lain yang sah. Pada pos pendapatan transfer juga sudah menerapkan PSAP No. 2 ayat 23 dengan penjelasan mengenai pendapatan transfer diartikan bahwa penerimaan segelintiran dana yang dikirimkan dari pelaporan entitas lain, misal dana perlimpahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Dalam LRA pendapatan transfer laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan menjadi pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah.

Komponen belanja LRA dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan berdasarkan fungsi yaitu Urusan opsional, Urusan Wajib Pelayanan Bukan Dasar, Ketertiban dan Keamanan, Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kependidikan serta Perawatan Sosial serta Kesehatan. Jenis pos belanja terbagi atas belanja mode, belanja tak terduga, belanja transfer dan belanja operasi. Ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Nganjuk telah sesuai adalah PSAP No. 2 ayat 34 dan 35 yang menyebutkan secara rinci tentang klasifikasi belanja menurut ekonomi, organisasi dan fungsi. Ayat 36, 37, dan 38 PSAP No. 02 yang menjelaskan tentang belanja modal, belanja operasi dan belanja tambahan telah ditetapkan di dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dengan belanja operasi yang mencakup belanja gaji pegawai, belanja bantuan sosial, belanja hibah serta belanja barang dan jasa; belanja modal mencakup belanja untuk aset tetap dan modal tambahan, belanja untuk perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, bangunan dan gedung, tanah, dan mesin dan peralatan serta belanja lain lain/tidak terduga yang mencakup kebutuhan dalam membantu bencana sosial dan dalam serta pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan lainnya.

Pada pelaporan *surplus/deficit* -LRA dalam LRA diatur dalam Ayat 47 PSAP No. 02 yang menyatakan selisih daripada pendapatan -LRA dan belanja saat periode pelaporan sesuai dengan pelaporan yang terdapat pada laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Ayat 41 Lampiran 1.02 menjelaskan bahwa dalam LP-SAL terdapat pos-pos antara lain sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, koreksi kesalahan dan saldo anggaran lebih akhir. Pernyataan dalam PP tersebut sudah ditetapkan dalam LKPD Kabupaten Nganjuk yang telah berisi pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, Sisa lebih dan saldo anggaran lebih akhir.

Neraca

Penyajian neraca di dalam LKPD Kabupaten Nganjuk telah sejalan dengan Ayat 45 dan 46 PSAP No. 1 karena telah menggambarkan klasifikasi aset berupa aset tetap, aset lancar dan aset lainnya serta klasifikasi liabilitas berupa liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Neraca juga menjelaskan pelaporan neraca dilakukan dalam satu periode. Klasifikasi poin-poin dari aset lancar diatur dalam PSAP No. 1 ayat 55 dan telah diterapkan dalam laporan keuangan Kabupaten Nganjuk yang meliputi kas, penyisihan piutang pajak, piutang pajak, PAD yang sah dan piutang lain-lain, piutang BLUD serta persediaan.

Aset non lancar dalam laporan keuangan Kabupaten Nganjuk berupa investasi berjangka waktu panjang yang terbagi atas investasi permanen dan investasi tidak permanen guna untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk daerah yang akan dialokasikan untuk program kerja pemerintah atau dipakai untuk masyarakat setempat. Penerapan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Ayat 56 dan 57 PSAP No. 1. Aset tetap pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah sejalan dengan Ayat 63 dan 64 PSAP No. 1 yang dilaporkan untuk aset tetap dikategorikan seperti mesin dan peralatan, tanah, struktur dan gedung, jalan jaringan, irigasi, konstruksi proses, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang berusia lebih dari 12 bulan dipergunakan untuk tujuan pemerintah dan masyarakat lokal.

Kewajiban yang disajikan di LKPD Kabupaten Nganjuk disebutkan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Liabilitas jangka pendek termasuk utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang lainnya. Pelaporan liabilitas yang dilakukan sudah sejalan dengan Ayat 77 PSAP No.1. Ekuitas yang dilaporkan juga telah sejalan dengan Ayat 84 dan 85 PSAP No.1 yang disebutkan bahwasanya ekuitas merupakan perhitungan selisih antara aset dan liabilitas dan merupakan saldo terakhir pada LPE.

Laporan Operasional (LO)

Lampiran 1.13 PSAP 12 ayat 13 menjelaskan dalam laporan operasional mencakup pos-pos berupa Pendapatan-LO, Surplus/defisit dari operasi, Beban, Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit-LO dan kegiatan non operasional. Hal ini telah sesuai dengan laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disusun. Pada pos pendapatan-LO di ayat 19 menjelaskan bahwasanya pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi adalah adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, penjelasan ini juga sesuai dengan pos pendapatan-LO di LKPD Kabupaten Nganjuk yang menggambarkan secara terperinci pendapatan yang didapatkan dari retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Juga dijelaskan dalam pendapatan pajak daerah bahwa pengakuan pendapatan terjadi saat timbulnya hak atas pendapatan.

Ayat 38 lampiran 1.13 PSAP menyebutkan klasifikasi ekonomi dikelompokkan berdasarkan jenis bebannya. Pada klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban bunga, beban subsidi, beban-beban bantuan sosial, beban hibah, beban transfer, beban pegawai dan beban lain-lain. Klasifikasi tersebut telah sesuai dengan pos beban dalam LKPD Kabupaten Nganjuk, dengan diklasifikasikan menurut jenisnya dari beban-LO terdiri dari beban operasi dan beban transfer dan beban operasi-LO yang terdiri dari beban pegawai, beban jasa, beban persediaan, beban perjalanan dinas, beban bantuan sosial dan beban lain-lain. Pada pos surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit-LO, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit kegiatan operasional dan di LPKD Kabupaten Nganjuk juga telah sesuai dengan PP No.71 ayat 45, 48, 50 dan 51 yang menjelaskan secara rinci mengenai selisih dan penjumlahan dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

PSAP 01 ayat 101 menjelaskan pos dalam laporan perubahan ekuitas dari ekuitas awal, koreksi, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Pernyataan ini telah sesuai di dalam LKPD Kabupaten Nganjuk yang menyebutkan pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas dalam LKPD juga menerangkan mengenai kenaikan ataupun penurunan terkait ekuitas dengan perhitungan selisih dari aset dan kewajiban yang dalam hal ini juga sesuai dengan PSAP 01 ayat 85.

Laporan Arus Kas (LAK)

Ketentuan prosedur penyajian dalam pelaporan laporan arus kas telah diatur dalam PSAP No. 3 ayat 13 dan 15 yang berisikan bahwa entitas pelaporan diwajibkan dalam menyusun dan melampirkan LAK itu merupakan entitas yang terdapat peran perbendaharaan umum. LAK terbagi atas aktivitas operasional, pendanaan, transitoris dan investasi. Laporan arus kas yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan tersebut dengan berisikan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan data pergerakan masuk dan keluar kas ataupun setara kas yang terjadi di BUD dan BLUD. Klasifikasi arus kas yang dilaporkan berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas non-anggaran dan arus kas dari pembiayaan serta aktivitas investasi aset non keuangan.

Arus kas operasional dalam LAK pemerintah Kabupaten Nganjuk memperlihatkan siklus pengeluaran dan penerimaan uang yang notabenehnya diimplementasikan untuk operasional program kerja dari pemerintahan maupun masyarakat umum dengan berbagai keperluan penggunaan, seperti gaji pegawai, pembayaran hibah, pembayaran barang dan jasa, pembayaran tunjangan hidup, pembayaran bagi hasil pajak ke desa dan pembayaran tak terduga. Pelaporan tersebut telah menerapkan ketentuan PSAP No. 3 ayat 21 dan 23. Ayat 27 dan 29 PSAP No. 3 menjelaskan aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan juga pembiayaan yang digunakan untuk pelepasan dan perolehan sumber daya aset dengan berbagai aktivitas, seperti penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan hal tersebut dengan laporan aktivitas investasi berupa pembelian tanah, perolehan bangunan dan gedung, pembelian mesin dan peralatan serta perolehan aset lain-lain.

Arus kas pendanaan yang dilaporkan dalam LKPD Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan menjadi arus kas keluar dan masuk, pada arus kas masuk menunjukkan aktivitas pembayaran piutang yang dilaporkan selama satu periode sedangkan untuk arus

kas keluar masih belum ada aktivitas. Pelaporan arus kas aktivitas pendanaan telah sejalan dengan Ayat 31 dan 33 PSAP No.3. Arus kas transitoris dalam pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga telah sesuai dengan Ayat 35 dan 36 PSAP No.3. Dijelaskan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk arus kas transitoris merupakan aktivitas masuk dan keluarnya kas di luar dari investasi dan pendanaan, aktivitas operasi. Arus kas transitoris dibagi menjadi arus kas masuk dan keluar. Penerimaan kurang catat bank dan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah aktivitas di kas masuk, dan pengeluaran PFK adalah aktivitas di kas keluar.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan biasanya memuat penjelasan yang dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami kesehatan dari posisi keuangan entitas pelaporan secara menyeluruh. PSAP No. 4 ayat 12 menjelaskan catatan laporan keuangan harus dijelaskan secara runtut dan mencakup neraca, laporan arus kas, laporan operasional serta laporan realisasi anggaran sehingga sesuai sama laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah disusun. Ayat 17 PSAP No.4 menyatakan bahwa CaLK harus berisikan informasi yang memberikan gambaran entitas secara keseluruhan dan dalam CaLK pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyajikan informasi tersebut yang dijelaskan di bab kebijakan akuntansi.

PSAP No. 4 ayat 19 menyampaikan bahwa CaLK haruslah terdapat pelaporan secara menyeluruh, termasuk kondisi makroekonomi dan kebijakan fiskal/keuangan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan hal tersebut dengan menjelaskan kebijakan fiskal/keuangan terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan untuk memaksimalkan pendapatan transfer, PAD serta lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan belanja daerah berorientasi kepada pemenuhan belanja bersifat wajib, serta untuk mendorong pencapaian target-target sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah menitikberatkan untuk tetap menjaga keseimbangan finansial daerah sehingga pemerataan daerah dapat berjalan sesuai harapan.

PSAP No. 4 ayat 24 menjelaskan mengenai rintangan dan tantangan yang terdapat dalam mencapai sasaran yang ditentukan CaLK. Ketetapan tersebut sudah sesuai dengan LKPD Kabupaten Nganjuk yang telah dibuat yang menjelaskan bahwa pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh berbagai masalah yang meliputi kurangnya kejujuran wajib pajak dan retribusi, ketidaktahuan wajib pajak, perkembangan teknologi informasi yang belum optimal dan piutang pajak yang masih belum dibayarkan.

Kebijakan akuntansi dalam LKPD Kabupaten Nganjuk berisikan informasi yang diklasifikasikan dari dasar-dasar akuntansi yang menjadi dasar penyusunan LKPD, Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, dasar pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD serta Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam SAP. Penyajian tersebut telah sejalan dengan Ayat 41 PSAP No.4 yang memberikan penjelasan tentang kebijakan akuntansi, serta prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas pelaporan, dan bagaimana penerapan kebijakan ini berdampak pada penyajian LRA, neraca, LP-SAL, LO, LPE serta LAK.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2023, menunjukkan bahwa Pemda Nganjuk belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh PP No. 71 tahun 2010. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara laporan keuangan Pemerintah Daerah Nganjuk tahun anggaran 2023 dan PP No. 71 tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 1 : Ketidaksesuaian antara PP No. 71 Tahun 2010 dengan LKPD 2023
Pemerintah Kabupaten Nganjuk**

NO	URAIAN	PP No. 71 Tahun 2023	LKPD 2023 Pemerintah Kabupaten Nganjuk
1	Ketidaksesuaian pada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di CaLK tahun 2023	<p>PSAP No. 4 Paragraf 20 Indikator ekonomi makro tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Domestik Regional Bruto/Produk Domestik Bruto 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Tingkat inflasi 4. Nilai tukar 5. Harga minyak 6. Tingkat suku bunga 7. Neraca pembayaran 	Pemda Kabupaten Nganjuk belum mengimplementasikan indikator ekonomi makro yang sudah ditetapkan di dalam PP No. 71 Tahun 2010
2	Ketidaksesuaian pada penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di CaLK tahun 2023	<p>PSAP No. 4 Paragraf 28 Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Menjabarkan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan; (b) Memberikan metode yang jelas atas rencana dan realisasi kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan (c) Menguraikan prosedur yang telah dirancang dan dilakukan oleh manajemen untuk dapat menghasilkan keyakinan yang beralasan bahwasanya informasi kinerja keuangan yang dilaporkan sudah relevan dan dapat diandalkan 	Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam CALK Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 hanya memperlihatkan realisasi dan anggaran kinerja keuangan tahun 2023 dan 2022

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2024)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan analisis dan penjabaran terkait persoalan yang telah dipaparkan pada bab di atas, dapat sampai pada kesimpulan bahwasanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan PP No. 71 Tahun 2010 dengan bukti adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan laporan keuangan yang kebanyakan terjadi pada catatan atas laporan keuangannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat di dalam penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada Ayat 20 dan 28 PSAP No.4. Secara garis besar penyajian laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah banyak kesesuaian terhadap PSAP.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik dalam penyajian laporan keuangan pemda yang lebih baik dan transparan.

Penelitian ini juga membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan (SAP) berbasis *accrual* dalam penyajian laporan keuangan Pemda. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi Pemda dan lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2022). *Accounting for and auditing of digital assets*. <http://tinyurl.com/mzan8m9j>
- Assyayuti, A. N. (2016). Analisis Pengelolaan Dan Penyajian Saldo Anggaran Lebih pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59337>.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fahira, A. (2010). *Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura*. 12, 1–8.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (1999). Concept Statement No. 34: Basic Financial Statements and Management’s Discussion and Analysis for State and Local Governments. *Governmental Accounting Standards Series, 171-A*.
- Harlinda, H. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Sorot*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.31258/sorot.11.2.3890>
- Pandowo, H., & Kudhori, A. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Kota Madiun). *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 11(1), 85-96. <https://www.academia.edu/download/78104826/15.pdf>.
- Jamaluddin Majid. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue August).
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Lamonisi, S., Standar..., P., Lamonisi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon the Analysis Implementation of Accounting Standards Accrual Based in the City Government Tomohon. *Jurnal EMBA*, 223(1), 223–230. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11592>.
- Mardiasmo, P. D. (2003). *Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi* (p. 45).
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12359>.

- Nganjuk, P. K. (2023). *PERBUP NO, 40 Tahun 2023*.
- Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamaibagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(71), 714–722. <https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6461>.
- Orniati, Y. (2009). Orniati, Y. (2009). Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. *Jurnal ekonomi bisnis*, 14(3), 206–213. *Journal Ekonomi Busines*, 206. <https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6461>.
- Pangalila, B. R., Pangemanan, S. S., Warongan, J. D. L., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 234–246. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13608>.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(01). <https://doi.org/10.36467/makro.2016.01.01.05>
- Rajab, E., & Jam'an, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. 145.
- Ranuba, E. D., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7118>.
- Rintiani, W. N. (2010). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010. *Univeritas Negeri Surabaya*, 2(17), 6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11232>.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 1–71.